

**PENGARUH STUDENTS FOR A DEMOCRATIC SOCIETY DAN VIETNAM  
VETERANS AGAINST WAR (1964-1973) TERHADAP PERUBAHAN  
KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT  
DALAM MENGAKHIRI PERANG VIETNAM**

**SINATRYA MIRASTAKA**

**ABSTRACT**

*By using Gabriel Almond's system theory to see the political system in the state, this thesis aims to explaining how SDS and VVAW as the social movements can affect the signing of Paris Peace Accords by the United States President Ricahrd Nixon in 1973. The created agenda of anti Vietnam war by the social movements and the emergence respond from the United States government that related about activity from the social movements showing the process that happened in the political system. By using this system theory, the established of anti-war agenda by social movement with interest socialization, articulation and aggregation in United States being as input. While the respond from the government about SDS and VVAW's agenda with emerging of opposition in congress until they proposed amendment and implementing discussion to investigation about the government's policy in the Vietnam War is output in system theory. The suitability between input and output as the result has been showing that social movement as the pressure group can giving influence to foreign policy change. It's seen from the change in foreign policy are realized with the signing of the Paris Peace Accords as an output in accordance with the demands of SDS and VVAW social movements as input.*

**Keywords :** *Vietnam War, United States, Students for a Democratic Society, Vietnam Veterans Against War, system theory, interest socialization, articulation, aggregation.*

**ABSTRAK**

Dengan menggunakan teori sistem Gabriel Almond yang digunakan untuk melihat berjalannya sistem politik suatu negara, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana gerakan sosial SDS dan VVAW dapat berpengaruh terhadap penandatanganan *Paris Peace Accords* oleh Presiden Amerika Serikat Richard Nixon pada tahun 1973. Pembentukan agenda anti-perang Vietnam yang dilakukan oleh kedua gerakan sosial tersebut serta adanya tanggapan pemerintah Amerika Serikat terhadap aktivitas gerakan sosial tersebut menunjukkan berjalannya sistem politik pada saat itu. Dengan menggunakan teori sistem pembentukan agenda perang dilakukan oleh kedua gerakan sosial tersebut dengan cara sosialisasi kepentingan, artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan di Amerika Serikat dijadikan sebagai fungsi *input*. Sedangkan tanggapan dari pemerintah terhadap pembentukan agenda perang oleh SDS dan VVAW yang ditandai dengan munculnya pihak-pihak oposisi anti-perang dalam Kongres Amerika Serikat hingga mengusulkan amandemen dan menggelar disukusi terkait dengan kebijakan Amerika Serikat dalam perang Vietnam

merupakan fungsi yang membentuk *output* dalam teori sistem. Kesesuaian antara *input* dan *output* yang dihasilkan akan menunjukkan bahwa gerakan sosial sebagai *pressure group* dapat berpengaruh dalam perubahan kebijakan luar negeri. Hal tersebut dilihat dari perubahan kebijakan luar negeri yang diwujudkan dengan penandatanganan *Paris Peace Accords* sebagai *output* sesuai dengan tuntutan dan permintaan dari gerakan sosial SDS dan VVAW sebagai *input*.

**Kata Kunci** : Perang Vietnam, Amerika Serikat, *Students for a Democratic Society*, *Vietnam Veterans Against War*, sosialisasi kepentingan, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, teori sistem Gabriel Almond.

Intensitas konflik antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara yang melibatkan Amerika Serikat dalam kelanjutan perang Indochina semakin meningkat pada masa pemerintahan John F. Kennedy di tahun 1962 sampai 1963. Pada tahun tersebut Amerika Serikat telah mengirimkan pasukan hingga mencapai 17.000 jiwa ([www.socialistworker.org](http://www.socialistworker.org), 2013). Namun pada masa pemerintahan tersebut, situasi perang Vietnam yang melibatkan Amerika Serikat belum banyak diketahui dan berada dibawah pengetahuan publik Amerika Serikat. Puncaknya ialah ketika peristiwa Gulf of Tonkin Incident<sup>1</sup> yang kemudian di tanggapi oleh Presiden Lyndon B. Johnson dengan memberikan resolusi. Resolusi yang dikenal dengan istilah Gulf of Tonkin Resoluion tersebut disetujui oleh Kongres dan menandai peningkatan intensitas keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Terkait dengan peningkatan keterlibatan dalam perang Vietnam, melalui Gulf of Tonkin Resolution pemerintah Amerika Serikat kemudian melakukan pengiriman pasukannya ke wilayah Vietnam ([www.clemson.edu](http://www.clemson.edu), 2013). Pada pertengahan tahun 1965, terjadi peningkatan jumlah pengiriman pasukan Amerika Serikat dari 47.000 hingga 220.000 jiwa pada akhir tahun 1965. Keputusan inilah yang kemudian menjadi pemicu dari munculnya gerakan sosial hingga tahun 1973 yang menentang keterlibatan Amerika Serikat dengan kebijakan mengirimkan pasukan perang ke wilayah Vietnam (<http://www.lexisnexis.com>, 2012).

Gerakan sosial yang muncul merasa bahwa persetujuan yang diberikan oleh Presiden Johnson tidak seharusnya dilakukan, terlebih keputusan tersebut dikeluarkan hanya tiga bulan setelah Johnson terpilih menjadi Presiden. Dalam aksinya, para pelajar kemudian melakukan demonstrasi untuk mengecam keterlibatan dan kebijakan pengiriman pasukan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Tuntutan dari rakyat Amerika Serikat yang ditunjukkan dengan munculnya gerakan sosial dan aksi demonstrasi pada saat itu menunjukkan adanya tekanan untuk segera menghentikan intervensi yang dilakukan terhadap Perang Vietnam karena untuk terlibat dalam suatu perang besar tidak cukup membutuhkan dana yang sedikit (Marquette, 2003). Beberapa bentuk gerakan sosial yang muncul pada saat itu ialah *Students for a*

---

<sup>1</sup>*Gulf of Tonkin Incident* merupakan insiden penyerangan pasukan Vietnam Utara terhadap kapal perang Amerika Serikat di kawasan perairan internasional pada tanggal 2 sampai 4 Agustus 1964.

Democratic Society (SDS) yang terbentuk pada tahun 1964 (Frum, 2000). Pada awalnya, gerakan ini aktif dalam mendukung kampanye yang dilakukan oleh Lyndon B. Johnson dengan mengangkat isu-isu sosial dan bukan merupakan gerakan sosial anti perang. Namun hal tersebut kemudian berubah ketika pemerintah Amerika Serikat di bawah Lyndon B. Johnson mulai menyerang kawasan Vietnam Utara dengan melakukan pengeboman di kawasan tersebut. Peristiwa tersebut mengakibatkan meningkatnya jumlah protes yang dilakukan oleh pelajar dari SDS yang sekaligus merubah perhatian dari gerakan ini menjadi lebih fokus terhadap isu-isu propaganda anti-perang (Marquette, 2003).

Aktivitas mahasiswa juga diikuti oleh masyarakat sipil dari berbagai macam golongan seperti Vietnam Veterans Against War (VVAW)<sup>2</sup> di Amerika Serikat dan beberapa gerakan yang didominasi oleh kaum wanita yang menolak untuk memberikan anak-anak mereka kepada negara untuk terlibat dalam perang Vietnam yang berkaitan dengan kebijakan wajib militer (<http://www.vvaw.org>, 2012). VVAW merupakan gerakan sosial yang melibatkan para veteran perang Vietnam yang telah kembali ke Amerika Serikat. Pada 15 April 1967 untuk pertama kalinya enam orang veteran perang vietnam melakukan aksi bersama demonstran lain di kota New York untuk terus melakukan penentangan terhadap kebijakan pengiriman pasukan dan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam (Olson, 1988). Hingga pada bulan Juni 1967 organisasi ini resmi dibentuk untuk ikut membantu upaya dari gerakan sosial di Amerika Serikat dalam menuntut pemerintah untuk mengakhiri perang tersebut. Munculnya VVAW juga memberikan informasi baru kepada publik tentang apa yang sebenarnya dialami oleh pasukan Amerika Serikat selama berada di dalam perang Vietnam. Aksi demonstrasi yang terus dilakukan oleh organisasi ini juga ikut menambah jumlah anggota di dalamnya.

Aktivitas dari gerakan sosial tersebut kemudian mulai mendapatkan tanggapan dari beberapa anggota Kongres Amerika Serikat yang ditunjukkan dengan adanya Fulbright Hearing, Cooper-Church Amendment, McGovern-Hatfield Amendment, Repeal of Tonkin Gulf Resolution dan Dellums War Crime Hearings pada tahun 1966 hingga 1971. Tanggapan-tanggapan yang muncul tersebut direalisasikan dalam bentuk diskusi yang di dalamnya terdapat kesaksian dan diskusi dari beberapa anggota Kongres dan beberapa gerakan anti-perang maupun *pro-war* (Brinkley, 2004). Hal ini menunjukkan adanya pihak oposisi dalam Kongres Amerika Serikat pada masa tersebut yang kemudian terlibat dalam setiap kegiatan sebagai tanggapan atas aktivitas gerakan sosial sebagai *pressure group* dan menghasilkan beberapa amandemen yang ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat. Hingga akhirnya pada bulan tahun 1973, mulai terjadi penurunan aktivitas militer yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat terkait dengan perang Vietnam. Hal tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan Paris Peace Accords yang menandakan perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam perang Vietnam oleh William Rogers sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Henry Cabot

---

<sup>2</sup>Beberapa anggota wajib militer yang dikirimkan ke Vietnam dan kembali ke Amerika Serikat membentuk suatu organisasi yang bertujuan untuk mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk segera menghentika perang Vietnam.

Lodge sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Vietnam pada saat itu (Wiest, 2008). Penandatanganan Paris Peace Accords yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perang mengindikasikan adanya upaya dari Amerika Serikat untuk mengakhiri perang tersebut ([www.pbs.org](http://www.pbs.org), 2012).

Penandatanganan perjanjian tersebut oleh Amerika Serikat memberikan dampak pada perubahan kebijakannya terkait dengan perang Vietnam. Amerika Serikat diwajibkan untuk menghentikan seluruh aktivitas militer yang berada dalam wilayah perbatasan dan perairan Vietnam. Amerika Serikat dituntut secara tegas untuk menghilangkan dan bila perlu menghancurkan seluruh kepemilikannya yang berada di kawasan Vietnam baik itu pangkalan militer atau pelabuhan yang memungkinkan akses bagi Amerika Serikat untuk masuk ke wilayah Vietnam ([www.home.earthlink.net](http://www.home.earthlink.net), 2012) Amerika Serikat juga melakukan penarikan seluruh pasukan perangnya yang berada di wilayah Vietnam untuk dipulangkan ke Amerika Serikat.

### **Kerangka Pemikiran: Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Dalam Teori Sistem Gabriel Almond**

Perubahan kebijakan luar negeri dilakukan oleh suatu negara ketika terdapat faktor-faktor dan aktor yang berinteraksi dan berkontribusi di dalam proses pembuatannya. Selain melalui faktor eksternal, perubahan kebijakan luar negeri juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal (domestik). Faktor domestik memainkan peranan penting dalam mempengaruhi dan menekan pemerintahan untuk memungkinkan terjadinya perubahan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006). Pengambil keputusan perlu untuk melihat faktor domestik dalam proses perubahan kebijakan luar negeri karena mereka juga harus memperhitungkan dukungan yang terakhir agar tetap dapat menjaga kekuasaan (Eidenfalk, 2006).

Diantara permasalahan yang terdapat dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi adalah tentang pengendalian terhadap hubungan antara entitas politik dan *pressure group*. Permasalahan ini kemudian menjadi peluang dalam interaksi yang muncul dari *pressure group* baik kepada legislatif maupun eksekutif. Diperlukan adanya perhatian yang lebih terhadap kehadiran publik dalam lingkungan politik. Faktor lingkungan domestik yang dimaksud dalam *pressure group* adalah sekumpulan etnis, komunitas dalam suatu populasi, aktivitas keagamaan, kelompok pekerja, pelajar dan perasaan sama yang muncul dari setiap individu harus dijadikan pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri (Blaisdell, 1958).

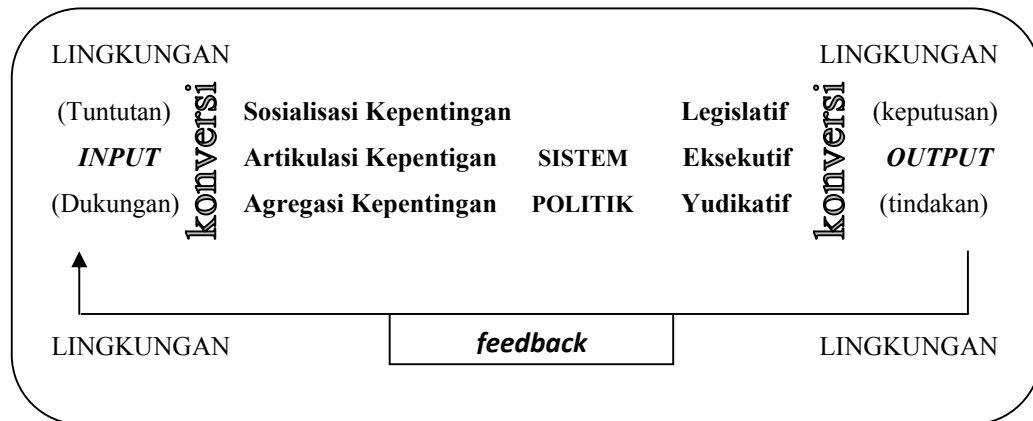
Gerakan sosial menjadi salah satu faktor domestik yang dapat menjadi pertimbangan dalam proses perubahan kebijakan luar negeri sebagai *pressure group* yang berkembang melalui isu-isu tertentu. Tujuan yang ingin dicapai oleh gerakan sosial dapat berupa suatu kebijakan khusus dan sempit, atau bahkan yang lebih luas ditujukan pada perubahan budaya seperti menuntut hak rakyat sipil yang dilakukan oleh mahasiswa, tuntutan kesetaraan gender oleh kaum perempuan, tuntutan kebebasan oleh kelompok gay serta gerakan lingkungan (Freeman & Johnson, 1999). Beberapa karakteristik gerakan sosial adalah mereka yang terlibat dalam hubungan

konflikual yang jelas dan dapat diidentifikasi oleh lawan. Gerakan sosial dihubungkan oleh jaringan-jaringan *non-formal* yang padat dan mereka cenderung untuk menyebarkan suatu identitas bersama yang berbeda (Porta & Diani, 2006). Gerakan sosial juga didefinisikan sebagai tindakan bersama *non-institutionalized* yang memiliki tujuan untuk merubah kondisi sosial yang ada (Harmon, 2011).

Setiap struktur memiliki fungsinya masing-masing ketika terlibat dalam sebuah sistem. Dengan demikian, sistem merupakan kesatuan seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan keseluruhan konsep yang mencakup semua tindakan berpola yang relevan dengan pengambilan keputusan politik dimaknai sebagai suatu sistem politik (Chilcote, 2003). Seperti dapat dilihat dalam gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa fungsi-fungsi politik kemudian diperlukan demi berlangsungnya sistem politik. Fungsi-fungsi politik dapat dibedakan menjadi dua yaitu, fungsi *input* dan fungsi *output*.

Dalam skema teori sistem politik yang ditunjukkan pada gambar 1.1 maka *input* merupakan masukan dari masyarakat dalam sistem politik. *Input* yang diberikan oleh masyarakat ke dalam sistem politik dapat berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dapat disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas sejumlah unit masyarakat dalam sistem politik. Dukungan secara sederhana adalah upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. *Output* adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. *Output* terbagi dua yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat. Fungsi *input* meliputi sosialisasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan dan komuni-

**Gambar 1.1 Skema Teori Sistem Gabriel Almond**



Sumber: Ronald H. Chilcote, *Theories of Comparative Politics: The Search for a Freedom*, ed. Haris Munandar dan Dudy Priatna (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 226.

kasi politik. Sosialisasi politik mendorong orang untuk berpartisipasi dalam budaya politik masyarakat. Sosialisasi politik melibatkan perekrutan orang dari kelas-kelas, kelompok-kelompok etnis dan sebagainya ke dalam sistem politik partai-partai, birokrasi, dan lain-lain. Artikulasi kepentingan adalah ekspresi kepentingan-kepentingan politik dan permintaan terhadap tindakan (Chilcote, 2003).

Agregasi kepentingan adalah koalisi kepentingan dan permintaan yang diartikulasikan oleh partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan dan berbagai entitas politik lainnya dan komunikasi politik melayani seluruh fungsi-fungsi politik ini. Sedangkan fungsi *output* meliputi pembuatan aturan, penerapan aturan dan penilaian aturan. *Output* merupakan fungsi-fungsi pemerintah dan berkaitan dengan penggunaan tiga kekuasaan tradisional pemerintah terpisah. Dengan demikian pembuatan aturan menggantikan legislasi, penerapan aturan menggantikan administrasi, dan penilaian aturan merujuk pada proses peradilan (Chilcote, 2003). Berdasarkan teori sistem Gabriel Almond, gerakan sosial dalam penelitian ini diposisikan sebagai *input* yang menjalankan fungsi sosialisasi kepentingan, artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan. Sedangkan kebijakan Amerika Serikat merupakan *output* yang dihasilkan melalui fungsi struktur dalam pemerintahan sebagai pembentuk *output*.

### **Sosialisasi, Artikulasi dan Agregasi Kepentingan: Pembentukan Agenda Anti-Perang Vietnam Oleh SDS dan VVAW**

Kemunculan SDS dan VVAW merupakan bentuk dari rasa tidak percaya dan kekecewaan yang muncul terhadap kondisi pemerintahan dan sikap pemimpin di negara mereka. Kepercayaan, penghormatan dan kepedulian masyarakat berubah menjadi pandangan negatif ketika pemerintahan negara mereka dianggap mulai tidak dapat menggunakan wewenangnya secara tepat. Bentuk-bentuk pandangan negatif tersebut berlaku kepada seluruh institusi pemerintahan mulai dari aparat keamanan sampai kepada sistem peradilan di negara mereka (Alinsky, 1971) Gerakan sosial yang muncul merasa bahwa aktivitas yang mereka lakukan dalam menyatakan tuntutan mereka ditujukan pada sasaran yang tepat. Pencapaian akan demokrasi yang sesungguhnya memaksa SDS dan VVAW untuk melakukan penolakan terhadap tindakan pemerintah Amerika Serikat dalam mengirimkan pasukan dan terlibat dalam perang Vietnam. Oleh karena itu dibutuhkan adanya sosialisasi kepentingan, artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan dari SDS dan VVAW sebagai *input* dalam mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk mengakhiri keterlibatan dalam perang Vietnam.

Sosialisasi kepentingan merupakan tahapan awal yang dilakukan fungsi *input* untuk dapat menyampaikan kepentingan yang dibawa oleh gerakan sosial sebagai *pressure group* kepada lingkungan sosial dalam teori sistem politik. Sosialisasi kepentingan dalam prosesnya melibatkan perekrutan orang maupun kelompok ke dalam sistem politik yang dapat mendorong orang untuk berpartisipasi dalam budaya politik masyarakat (Chilcote, 2003). SDS sebagai *pressure group* yang berbentuk gerakan sosial dalam melakukan sosialisasi politik menggunakan isu-isu yang bersifat sosial. Dalam melakukan sosialisasi kepentingan, SDS yang merupakan gerakan

sosial dari mayoritas pelajar atau mahasiswa menggunakan cara “teach-ins” yang digunakan untuk menyebarkan pengaruhnya. “Teach-ins” merupakan pendekatan yang dilakukan oleh para pelajar yang sudah tergabung dalam SDS kepada pelajar lain yang diharapkan dapat bergabung untuk ikut berpartisipasi dalam aksi-aksi SDS. Pendekatan “teach-ins” dilakukan dengan cara mengadakan diskusi terbuka ataupun seminar yang mengutamakan pembahasan dan pembelajaran bagi pelajar mengenai moral dan latar belakang pemerintah Amerika Serikat melakukan invasi ke Vietnam ([www.english.illinois.edu](http://www.english.illinois.edu)). Sedangkan VVAW melakukan sosialisasi kepentingan dengan menggunakan *underground press* sebagai alat. *Underground press* merupakan media cetak yang muncul pada tahun 1960-an dan digunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan untuk menyebarkan dan menginformasikan perkembangan tentang isu yang sedang diangkat pada masa tersebut. *Underground press* biasanya dimanfaatkan untuk melawan pemerintah dengan menyampaikan tuntutan mereka (Harmon, 2011). Media cetak ini digunakan untuk memperlihatkan kepada publik tentang fakta yang terjadi dalam perang Vietnam berdasarkan pengalaman dari veteran. Dengan cara ini VVAW mencoba untuk memberikan gambaran kepada publik tentang sebenarnya yang dialami oleh para psukan perang Amerika Serikat. Selain itu, anggota VVAW juga menjadi bagian dalam *underground press* sebagai editor seperti Jeff Sharlet yang merupakan pimpinan editor GI Vietnam Press yang diawal penyebarannya memiliki pengaruh besar dalam kelanjutan *underground press* di Amerika Serikat pada tahun 1967 hingga akhir tahun 1970an (Cortright, 2005).

Gerakan sosial sebagai *pressure group* dalam melakukan kegiatannya dapat dilihat melalui aksi-aksi yang dilakukan berdasarkan isu yang sedang berkembang. Kegiatan tersebut dapat diartikan sebagai artikulasi kepentingan dari gerakan sosial SDS dan VVAW untuk menunjukkan ekspresi-ekspresi kepentingan politik dan permintaan terhadap munculnya suatu tindakan dari pemerintah Amerika Serikat untuk mengakhiri pengiriman pasukan dan keterlibatan dalam perang Vietnam. Pada tahun 1965, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh SDS dari lingkungan kampus mulai turun langsung ke jalan raya di Amerika Serikat. Gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas umum mulai dijadikan sasaran oleh SDS untuk menunjukkan tuntutan mereka kepada pemerintah Amerika Serikat ([www.hccfl.edu](http://www.hccfl.edu)). Pada bulan Mei 1965 sebanyak 40 anggota mahasiswa dari SDS melakukan aksi pembakaran surat wajib militer yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai surat perintah perekrutan laki-laki berusia muda untuk ditugaskan dalam perang Vietnam (Herring, 1986). SDS juga memimpin jalannya aksi protes *sit-ins* di sekitar Pentagon yang dilakukan bersama mahasiswa dari beberapa universitas di Amerika Serikat ([www.nonviolent-conflict.org](http://www.nonviolent-conflict.org)). Sedangkan artikulasi kepentingan yang dilakukan oleh VVAW lebih mengarah pada upaya-upaya untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi dalam perang Vietnam melalui berbagai cara diantaranya, Operation RAW, Winter Soldier Investigation, Dewey Canyon III, Operation POW dan Statue of Liberty Occupations.

Sosialisasi dan artikulasi kepentingan yang dilakukan gerakan sosial berfungsi untuk menunjukkan kepentingan yang dibawa oleh gerakan sosial tersebut baik kepada publik maupun pemerintah. Dengan memperlihatkan kepentingan dari gerakan sosial baik kepada publik maupun pemerintah, maka tujuan selanjutnya adalah terciptanya agregasi kepentingan dari isu-isu yang dibawa oleh gerakan sosial tersebut hingga dapat berpengaruh dalam proses perubahan kebijakan luar negeri. Agregasi kepentingan merupakan koalisi kepentingan dan permintaan yang diartikulasikan oleh partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan dan berbagai entitas politik lainnya (Chilcote, 2003). Munculnya kelompok kepentingan baru dan koalisi dalam Kongres Amerika Serikat menunjukkan adanya agregasi kepentingan yang dibawa oleh SDS dan VVAW dalam setiap aksinya. Agregasi kepentingan yang muncul dari adanya pengaruh SDS dan VVAW melibatkan beberapa kelompok kepentingan, politisi, anggota Kongres, media massa dan tokoh-tokoh dari kalangan selebriti yang kemudian menunjukkan aksi penolakan kebijakan pengiriman pasukan dan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam.

Pergerakan yang dilakukan oleh SDS sejak tahun 1964 diikuti oleh gerakan mahasiswa lain yang juga tergabung dalam Students Peace Association, Free Speech Movement, dan beberapa Civil Rights Movement. Sosialisasi kepentingan yang dilakukan oleh SDS dengan menggunakan cara “teach-ins” memberikan pengaruh pada rasa takut yang muncul dalam diri pemuda-pemuda di Amerika Serikat jika pemerintah kemudian memilih mereka sebagai anggota wajib militer dan dikirim dalam perang Vietnam. Adanya dukungan dari tokoh-tokoh seperti Martin Luther King, Jr, John Winston Lennon dan beberapa tokoh ternama yang ditunjukkan dengan ikut melakukan demonstrasi juga semakin memberikan pengaruh besar dalam agregasi kepentingan SDS dengan jumlah anggota yang semakin bertambah (Hodobod’ova; 120).

Selama tahun 1967, jumlah aktivis dan warga Amerika Serikat yang menolak kebijakan pengiriman pasukan dan keterlibatan dalam perang Vietnam terus meningkat. Bertambahnya anggota SDS dan keterlibatan pihak lain khususnya pemuda dalam setiap aktivitas yang dilakukan SDS menunjukkan adanya kesamaan kepentingan dalam isu perang Vietnam. Ketika SDS memimpin jalannya aksi “sit-ins” di Pentagon, pemuda-pemuda dan gerakan sosial lain berkumpul menjadi satu untuk menuntut pemerintah Amerika Serikat. Aksi-aksi yang dilakukan oleh SDS dan beberapa gerakan sosial dalam melakukan tuntutan juga menjadi latar belakang bagi munculnya gerakan sosial lain yang memiliki kepentingan sama namun memiliki perbedaan dalam mengartikulasikan kepentingannya.

Sikap-sikap radikal seperti merusak fasilitas umum dan gedung-gedung pemerintah Amerika Serikat yang dilakukan dalam aksi SDS memunculkan bentuk protes baru yang dikenal dengan nama “moratoriums”. Moratoriums merupakan bentuk protes yang dilakukan tidak dengan cara kekerasan atau *non-violent protest* (Hodobod’ova;122). Penggabungan kepentingan dari SDS, moratoriums dan gerakan sosial lain pada tahun 1967 – 1969 memberikan cara baru dalam artikulasi kepentingan gerakan sosial di Amerika Serikat dengan berjalan, membawa lonceng gereja, melakukan doa bersama untuk para pasukan yang tewas dalam perang



Vietnam dan menyanyikan lagu yang bertemakan perdamaian seperti “Give Peace a Chance”<sup>3</sup> yang diciptakan oleh John Winston Lennon yang dirilis pada tahun 1969 (Norman, 2008).

Sementara aktivitas SDS terus berlanjut, kemunculan VVAW juga mendapatkan dukungan dari beberapa anggota Kongres dan tokoh masyarakat yang dilakukan salah satunya dengan menyumbangkan dana untuk membantu VVAW dalam melaksanakan kegiatannya. Pada pelaksanaan Operation RAW, anggota senat yang ikut terlibat seperti George McGovern, Edmund Muskie, Rep. John Conyers dan Paul O'Dwyer mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh VVAW dalam membentuk agenda anti-perang Vietnam di Amerika Serikat. Nama-nama seperti John Kerry, Joe Kennedy, Rev. James Bevel, Mark Lane, Sutherland dan artis Jane Fonda juga sering dijadikan sebagai pembicara dalam aksi yang dilakukan oleh VVAW (Harmon, 2011). Pada pelaksanaan Winter Soldier Investigation, tokoh-tokoh ternama dari kalangan selebriti dan aktivis perdamaian mengumpulkan dana untuk membantu kegiatan *Winter Soldier Investigation*. Seperti yang dilakukan oleh selebriti yang juga menjadi aktivis perdamaian Jane Fonda yang mengumpulkan donasi dari 54 universitas hingga mencapai \$10.000 untuk menunjang kegiatan *Winter Soldier Investigation* yang memerlukan biaya \$50.00 - \$75.000 (Harmon, 2011). Begitu juga dengan John Winston Lennon dan Martin Luther King, Jr yang melibatkan diri dalam demonstrasi yang dilakukan gerakan sosial pada tahun 1967 – 1969 dan aksi Moratorium di Washington menuntut penghentian pengiriman pasukan dan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam.

Agregasi kepentingan menjadi hal penting dalam proses pencapaian kepentingan yang dibawa oleh gerakan sosial dalam lanjutan sosialisasi dan artikulasi kepentingan pada teori sistem. Munculnya aktor baru yang juga membawa kepentingan sama memperlihatkan bagaimana sosialisasi dan artikulasi politik yang dilakukan oleh SDS dan VVAW dapat berpengaruh terhadap lingkungan sosial dan politik Amerika Serikat. Pengaruhnya terhadap lingkungan sosial terlihat dari munculnya gerakan sosial baru maupun bergabungnya kelompok kepentingan lain dalam aktivitas SDS dan VVAW dalam membawa kepentingan yang sama. Sedangkan munculnya koalisi kepentingan yang ditunjukkan dengan beberapa oposisi dalam Kongres Amerika Serikat dan adanya upaya dari pemerintah Amerika Serikat untuk mempertimbangkan tuntutan dari SDS dan VVAW merupakan pengaruh terhadap lingkungan politik. merupakan pengaruh terhadap lingkungan politik.

### **Tanggapan Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Aktivitas Students For A Democratic Society & Vietnam Veterans Against War 1964-1973**

Peningkatan intensitas keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam telah memunculkan tuntutan baru baik dari publik berupa gerakan sosial yang melakukan demonstrasi dan kemunculan pihak oposisi anti-perang dalam pemerintahan Amerika Serikat (Wilbanks, 2013). Adanya upaya pembentukan

---

<sup>3</sup> *Give Peace a Chance* merupakan lagu yang diciptakan oleh John Winston Lennon dalam rangkaian aksi *Bed In for Peace* yang dilakukan oleh John Winston Lennon bersama istrinya Yoko Ono untuk menolak perang Vietnam dan penggunaan kekerasan dalam aksi demonstrasi.

agenda anti-perang yang dilakukan oleh gerakan sosial dapat dikatakan berpengaruh ketika muncul interaksi antara gerakan sosial dan pemerintah Amerika Serikat yang kemudian menjadikan tuntutan dan permintaan dari gerakan sosial sebagai pertimbangan dalam proses perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Pertimbangan tersebut dapat terlihat adanya tanggapan dari pemerintah Amerika Serikat terhadap aktivitas pembentukan agenda anti-perang Vietnam oleh SDS dan VVAW sebagai *pressure group*.

Amerika Serikat memiliki tiga lembaga dalam sistem pemerintahannya yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang digunakan untuk menjalankan sistem politik. Namun, legislatif dan eksekutif merupakan lembaga yang memiliki fungsi penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri (Dobson and Marsh, 2006). Legislatif Amerika Serikat atau yang dikenal dengan Kongres dalam pemerintahan Amerika Serikat memiliki dua majelis yaitu House of Representative (HoR) dan Senat. (Harris and Tichenor;221). Sedangkan lembaga eksekutif merupakan wewenang Presiden Amerika Serikat yang dapat menetapkan kebijakan luar negeri dengan atau tanpa persetujuan dari Kongres. Kebijakan untuk meningkatkan pengiriman pasukan dalam perang Vietnam dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai tanggapan dalam insiden Gulf of Tonkin. Beberapa jam setelah peristiwa tersebut, Presiden Lyndon B. Johnson memberikan resolusi yang dikenal dengan Gulf of Tonkin Resolution untuk meningkatkan keterlibatan Amerika Serikat dengan melakukan pengiriman pasukan ke wilayah Vietnam yang kemudian disetujui oleh 88/408 anggota Kongres pada bulan Agustus 1964 (Moise, 1996).

Kebijakan Presiden Amerika Serikat dan Kongres untuk mengirim pasukan Amerika Serikat dalam perang Vietnam yang terus mengalami peningkatan menjadi pemicu dari gerakan sosial SDS dan VVAW sejak tahun 1964 – 1973 dalam melakukan tuntutan terhadap perubahan kebijakan luar negeri untuk segera melakukan penarikan dan memberhentikan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Terpilihnya Richard Nixon sebagai Presiden pada tahun 1969 yang kemudian mengeluarkan Doktrin Nixon mulai menunjukkan adanya tanggapan dari pemerintah Amerika Serikat terhadap tuntutan dari SDS dan VVAW sebagai *pressure group*. Namun, hingga tahun 1970 Amerika Serikat bersama Vietnam Selatan justru semakin memperluas konflik di Asia Tenggara dengan melakukan *secret bombing* di kawasan Laos dan Kamboja (Morocco, 1985). Terlepas dari kondisi ekonomi yang mulai menjadi permasalahan Amerika Serikat dalam mendanai aktivitas perang Vietnam, tekanan dan tuntutan dari publik Amerika Serikat yang terus meningkat setelah mengetahui fakta-fakta yang disampaikan dalam setiap aksi SDS dan VVAW juga menjadi pertimbangan pemerintah Amerika Serikat dalam kebijakan luar negeri terkait perang Vietnam.

Kemunculan oposisi pada Kongres yang juga ikut memberikan rekomendasi dari tekanan dan tuntutan publik pada setiap sidang yang dilakukan oleh Kongres menunjukkan interaksi struktur pada teori sistem. Sosialisasi, artikulasi dan agregasi kepentingan yang telah dibahas pada bab II, memunculkan keterkaitan antara tuntutan dan permintaan dari gerakan sosial sebagai *pressure group* dengan tanggapan dari pemerintah dengan kemunculan oposisi yang juga ikut membawa kepentingan dari

gerakan sosial dalam Kongres Amerika Serikat. Oleh karena itu diperlukan adanya fungsi struktur yang menjadi faktor dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai *output* dalam teori sistem politik. Tanggapan pemerintah Amerika Serikat terhadap tuntutan gerakan sosial tersebut terlihat dari Fulbright Hearings, Cooper-Church Amendment, McGovern-Hatfield Amendment, Repeal of Tonkin Gulf Resolution dan Dellums War Crime Hearings. Tanggapan Kongres ini kemudian menjadi fungsi dari latar belakang terciptanya *output* kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam penandatanganan Paris Peace Accords pada tahun 1973 yang menandai pemberhentian keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam dengan menarik pasukannya kembali dari wilayah Vietnam.

### **Fulbright Hearings**

Selama tahun 1966 sampai 1971, Senate Foreign Relations Committee (SFRC) melakukan beberapa penyelidikan dan jajak pendapat dengan beberapa pihak oposisi terkait keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Pada tanggal 16 Agustus 1966, untuk pertama kalinya dengan diketuai dan dipimpin oleh Senator J. William Fulbright, SFRC mengadakan diskusi dan jajak pendapat untuk membahas masa depan Amerika Serikat dalam perang Vietnam yang dikenal dengan istilah Fulbright Hearings. Sejak tahun 1966, Fulbright yang menjabat sebagai ketua SFRC bersama oposisi anti-perang perang lainnya dalam Kongres mulai merasakan arogansi dari pemerintahan Lyndon B. Johnson dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan perang Vietnam. Hingga tahun 1967, lembaga eksekutif Amerika Serikat secara jelas telah menggunakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Kongres dan meningkatkan kekuatan legislatif tanpa mempertimbangkan konstitusi (Woods, 1994). Keseluruhan pernyataan yang diberikan oleh anggota dalam Fulbright Hearings berisi tentang kondisi yang harus pertimbangan oleh Amerika Serikat dalam perang Vietnam dan tuntutan untuk segera mengakhiri pengiriman pasukan serta keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Fulbright Hearings dalam prosesnya telah memberikan tempat bagi pihak oposisi anti-perang dan pro-perang untuk dapat berdiskusi, mendengarkan kesaksian serta memberikan suatu resolusi dalam permasalahan perang Vietnam. Namun, penting untuk dilihat tujuan yang mengawali gagasan pembentukan Fulbright Hearings adalah untuk membatasi wewenang yang digunakan oleh eksekutif terutama dalam permasalahan perang.

### **Cooper-Church Amendment**

Cooper-Church Amendment merupakan amandemen yang diajukan oleh senator John Sherman Cooper dan Frank Church terkait keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam dan perluasan konflik di Asia Tenggara. yang kemudian disetujui oleh Kongres pada tahun 1970. Setelah mengalami masa penundaan pembahasan selama tujuh minggu dan debat selama enam bulan akhirnya amandemen Cooper-Church terwujud pada 5 Januari 1971. Dengan menggunakan amandemen ini untuk pertama kalinya Kongres Amerika Serikat melakukan pembatasan terhadap peningkatan ataupun pengiriman jumlah pasukan terkait dengan keputusan Presiden sebagai lembaga eksekutif. Amandemen ini secara khusus

dibentuk untuk membatasi wewenang yang dimiliki oleh Presiden dalam melakukan pengiriman dan penambahan jumlah pasukan dalam perang Vietnam (Schmitz, 2006).

Keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam hingga tahun 1973 telah menyebabkan perluasan konflik di kawasan Asia Tenggara. Penyerangan terhadap wilayah Kamboja dan Laos yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan pada tahun 1969 – 1970 juga menjadi perhatian penting bagi oposisi anti-perang dalam pemerintahan Amerika Serikat. Terbentuknya amandemen ini tidak langsung memberikan pengaruh pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada pemerintahan Richard Nixon. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya upaya untuk menghentikan perang Vietnam oleh Richard Nixon yang justru menghiraukan amandemen Chooper-Church dengan terus melibatkan pasukan Amerika Serikat dalam perang Vietnam pada tahun 1971 – 1973. Lemahnya upaya pemerintah Amerika Serikat dalam menghentikan pengiriman pasukan dan keterlibatan dalam perang Vietnam juga terlihat dari perdebatan yang membutuhkan waktu lama untuk dapat merealisasikan amandemen tersebut. Namun, upaya yang dilakukan oleh oposisi pada Kongres Amerika Serikat dalam mewujudkan amandemen ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membatasi pendanaan Amerika Serikat dalam perang Vietnam (Schmitz, 2006).

### **McGovern-Hatfield Amendment**

McGovern-Hatfield Amendment merupakan amandemen yang diusulkan oleh senator George McGovern dan Mark Hatfield pada akhir tahun 1970. Jika pada Cooper-Church Amendment permasalahan yang menjadi fokus adalah perluasan konflik Amerika Serikat ke wilayah Kamboja dan Laos, dalam perencanaan McGovern-Hatfield Amendment kedua senator berupaya untuk mendesak eksekutif melalui Kongres untuk segera menyerah dan menarik kembali pasukan Amerika Serikat di wilayah Vietnam (Mann, 2001). Keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam yang meningkat sejak Kongres menyetujui Gulf of Tonkin Resolution pada tahun 1964 justru akan memunculkan permasalahan baru baik secara eksternal maupun internal. Terdapat dua tuntutan utama yang ingin diusulkan dalam McGovern-Hatfield Amendment. Yang pertama adalah tentang penghentian pemberian dukungan berupa dana kepada pasukan Amerika Serikat dalam perang Vietnam yang terhitung sejak tanggal 30 April 1971. Sedangkan usulan yang kedua merupakan persyaratan yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam menggunakan dukungan berupa dana terhitung setelah tanggal 30 April 1971.

Persyaratan yang dimaksud dalam amandemen ini bertujuan agar dana yang dikeluarkan Amerika Serikat setelah tanggal 30 April 1971 digunakan untuk melakukan penghentian wajib militer dan penarikan pasukan Amerika Serikat hingga 31 Desember 1971 dan menjamin pembebasan tawanan perang. Namun pada tanggal 1 September 1970, pengajuan amandemen ini ditolak oleh Presiden Richard Nixon dan pendukungnya didalam Kongres Amerika Serikat dengan alasan bahwa pemberian batas waktu pemberhentian pengiriman pasukan dan pendanaan dalam perang Vietnam akan menurunkan *bargaining position* Amerika Serikat dalam proses negosiasi dengan Vietnam Utara (Mann, 2001).

## **Repeal of Tonkin Gulf Resolution**

Sejak diputuskannya Tonkin Gulf Resolution oleh Presiden Lyndon B. Johnson pada tahun 1964, jumlah pengiriman pasukan dan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam terus mengalami peningkatan. Keputusan ini justru menimbulkan konflik baru di Asia Tenggara yang melibatkan Amerika Serikat seperti pada kasus Laos dan Kamboja. Pada tahun 1967, pihak oposisi dalam Kongres mulai melakukan penyelidikan terhadap permasalahan dalam pendanaan dan tujuan rasional dari keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Dukungan terhadap pencabutan Gulf of Tonkin Resolution terus diberikan oleh gerakan sosial, opini publik dan pernyataan dari pihak oposisi yang menuntut Kongres Amerika Serikat melalui SFRC untuk melakukan penyelidikan terhadap wewenang yang dimiliki oleh Presiden dan dampak dari resolusi tersebut (D'Amato and O'Neil, 1972).

Meningkatnya tuntutan dari gerakan sosial sebagai *pressure group* dan opini publik dalam penolakan terhadap pengiriman pasukan dan keterlibatan perang Vietnam kemudian direalisasikan dengan penandatanganan Repeal of Tonkin Gulf Resolution oleh Presiden Richard Nixon pada bulan Januari 1971. Dengan pencabutan resolusi tersebut, Kongres menghentikan seluruh bantuan terhadap pasukan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Namun, pemberhentian bantuan oleh Kongres tidak dapat langsung diterapkan ketika pasukan Amerika Serikat yang masih berada di wilayah Vietnam masih membutuhkan bantuan untuk dapat bertahan dalam kondisi perang tersebut. Pemberhentian dukungan berupa pendanaan yang dilakukan oleh Kongres menunjukkan adanya upaya untuk mengakhiri keterlibatan dan pengiriman pasukan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Walaupun tidak ada pernyataan yang menandai berakhirnya keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam, dengan disetujuinya Repeal of Tonkin Gulf Resolution secara langsung telah menjelaskan bahwa Presiden sebagai lembaga eksekutif selanjutnya tidak memiliki kekuatan penuh untuk dapat menyatakan perang walaupun Presiden juga berperan sebagai panglima angkatan bersenjata Amerika Serikat karena secara konstitusi pendeklarasian perang merupakan wewenang dari Kongres Amerika Serikat (D'Amato and O'Neil, 1972).

## **Dellums War Crime Hearings**

Munculnya kepentingan-kepentingan baru yang dibawa oleh pihak oposisi dapat dipengaruhi oleh latar belakang dari pihak oposisi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap Ronald V. Dellums yang merupakan anggota HoR untuk wilayah California. Kepedulian Dellums terhadap keterlibatan dan pengiriman pasukan Amerika Serikat dalam perang Vietnam dilatarbelakangi oleh keterlibatannya di beberapa organisasi sosial sebelum Dellums terpilih sebagai anggota HoR dalam Kongres Amerika Serikat. Selain itu adanya tuntutan dari gerakan sosial yang muncul di Amerika Serikat seperti SDS dan VVAW semakin memperkuat posisinya dalam pihak oposisi anti-perang. Dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya dalam Kongres dan menjadi juru bicara dari anggota HoR oposisi anti-perang, pada tahun 1970 Dellums melakukan kampanye dalam Kongres yang digunakan untuk membawa kepentingannya. Terpilihnya kembali Dellums pada tahun 1971 dengan

cepat menjadi berita utama di Amerika Serikat. Hal tersebut terkait dengan sikap kontroversi Dellums dalam melakukan setiap aksinya terhadap pemerintah Amerika Serikat. Jika mayoritas anggota Kongres lebih sering bersikap hati-hati dalam mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan perang Vietnam, Dellums menunjukkan sikap atau cara-cara aktif dan vokal kepada anggota seluruh anggota legislatif dalam menanggapi permasalahan Amerika Serikat dan perang Vietnam (Swain, 2006).

Dengan mengajukan beberapa amandemen dan mengadakan diskusi untuk membahas permasalahan pengiriman pasukan dan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam, pihak oposisi anti-perang yang muncul pada tahun 1966 – 1971 berupaya untuk membatasi wewenang yang dimiliki oleh Presiden sebagai lembaga eksekutif pada pemerintahan Amerika Serikat. Beberapa amandemen dan investigasi dengan cara diskusi yang dilakukan oleh pihak oposisi anti-perang bahkan tidak disetujui oleh Kongres. Namun, tetap berjalannya proses tuntutan tersebut menjadi pertimbangan baru dalam pemerintahan Amerika Serikat, mengingat fungsi non-legislatif dari Kongres yang terpenting adalah melakukan investigasi atau penyelidikan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membuat undang-undang di masa yang akan datang dan melihat keefektifan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, dalam investigasi yang dilakukan, Kongres dapat mengundang sejumlah pakar dan narasumber untuk membantu pemeriksaan dan membuat persoalan pokok penyelidikan secara rinci (Schroeder, 200). Hingga akhirnya pada bulan April 1973 melalui pidato Richard Nixon dan penandatanganan Paris Peace Accords oleh William Rogers sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Henry Cabot Lodge sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Vietnam pada saat itu, Amerika Serikat menyatakan untuk menghentikan pengiriman pasukan dan keterlibatannya dalam perang Vietnam.

### **Analisis Fungsi *Input* dan *Output* Teori Sistem**

Gerakan sosial SDS dan VVAW dalam penilitan ini dijadikan sebagai *input* yang ikut berperan dalam proses pengambilan kebijakan di Amerika Serikat untuk mengakhiri keterlibatan dalam perang Vietnam. Sebagai *pressure group*, SDS dan VVAW dalam prosesnya ditunjukkan melalui tahapan-tahapan yang terdapat dalam fungsi *input* pada teori sistem. Sosialisasi politik, artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan dilakukan oleh SDS dan VVAW dalam upaya memperlihatkan tuntutan terhadap perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Vietnam. Kebijakan Amerika Serikat untuk meningkatkan jumlah pasukan dan terlibat dalam perang Vietnam merupakan implementasi dari wewenang Presiden sebagai lembaga eksekutif.

Sejak disetujuinya Gulf of Tonkin Resolution pada masa pemerintahan Lyndon B. Johnson sampai Richard Nixon, wewenang yang digunakan eksekutif mulai dirasakan Kongres telah melewati batas. Wewenang eksekutif yang digunakan untuk terus meningkatkan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam dengan melakukan pengiriman pasukan memunculkan pertentangan dan permasalahan dalam Kongres. Permasalahan tersebut terkait dengan pembagian

kekuasaan pada setiap lembaga pemerintahan Amerika Serikat secara konstitusi. Permasalahan dalam pemerintahan Amerika Serikat juga diikuti dengan terus meningkatnya tuntutan dari gerakan sosial yang menyatakan sikap penolakannya sebagai warga negara terhadap pengiriman pasukan dan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam

Hingga pada tahun 1966 – 1971 mulai muncul tanggapan dari pemerintah khususnya dalam Kongres Amerika Serikat terhadap tuntutan SDS dan VVAW. Upaya-upaya tersebut memperlihatkan berjalannya fungsi non-legislatif dari Kongres Amerika Serikat. Fulbright Hearings dapat dikatakan sebagai tahapan awal dari terbentuknya oposisi terhadap kebijakan Amerika Serikat dalam perang Vietnam dan munculnya amandemen maupun diskusi lain seperti Cooper-Church, Repeal of Tonkin Gulf Resolution dan Dellums War Crime Hearings. Melalui Cooper-Church Amendment untuk pertama kalinya wewenang yang dimiliki oleh eksekutif mulai dibatasi khususnya dalam kebijakan yang berkaitan dengan perang Vietnam. Presiden sebagai lembaga eksekutif diharuskan untuk mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil dalam perang Vietnam dengan Kongres. Keterlibatan beberapa anggota gerakan sosial dalam setiap aktivitas pihak oposisi anti-perang dalam Kongres Amerika Serikat digunakan untuk mendengarkan tuntutan dan pendapat mereka terkait perang Vietnam.

Aktivitas dari pihak oposisi anti-perang dalam Kongres Amerika Serikat ini juga dilakukan untuk memperjelas kekuasaan dari setiap lembaga dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat. Hingga pada tanggal 15 Januari 1973, Preseiden Nixon mengumumkan pemberhentian seluruh penyerangan pasukan ke wilayah Vietnam Utara sebagai upaya dalam proses negosiasi perdamaian yang dilanjutkan dengan penandatanganan Paris Peace Accords oleh William Rogers sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Henry Cabot Lodge sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Vietnam pada tanggal 27 Januari 1973. Kesepakatan tersebut menandai berakhirnya keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam dan dilanjutkan dengan penarikan seluruh pasukan Amerika Serikat dari wilayah Vietnam yang sesuai dengan tuntutan SDS dan VVAW pada tahun 1964 – 1973. Perubahan kebijakan luar negeri yang terjadi merupakan proses dari berjalannya fungsi *output* pada level proses perumusan (legislatif) dan pelaksanaan (eksekutif) yang kemudian berujung pada *action*, yaitu penandatanganan Paris Peace Accord. Proses pembuatan kebijakan luar negeri tersebut menunjukkan fungsi dari legislatif dan eksekutif sebagai pembentuk *output* dalam teori sistem Gabriel Almond.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori sistem Gabriel Almond dan didukung oleh data-data yang dipaparkan, hipotesis yang diajukan penulis terbukti. Teori sistem Gabriel Almond yang menunjukkan berjalannya sistem politik di suatu negara digunakan oleh penulis untuk menjelaskan pengaruh dari gerakan sosial sebagai *pressure group* terhadap perubahan kebijakan Amerika Serikat dalam mengakhiri perang Vietnam. Amerika Serikat sebagai negara demokrasi memiliki tiga lembaga pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif dan

yudikatif yang digunakan untuk menjalankan sistem politiknya berdasarkan pada konstitusi untuk diterapkan serta dijalankan masyarakatnya. Pemisahan tiga kekuasaan dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat tersebut mengakibatkan sering terjadinya pertentangan dan konflik terutama antara legislatif dan eksekutif dalam menanggapi kemunculan dan tuntutan dari *pressure group* seperti gerakan sosial.

Penting untuk kemudian dilihat bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh gerakan sosial sebagai *pressure group* dapat menjadi pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri di Amerika Serikat. Tercapainya kepentingan yang dibawa melalui tuntutan dari gerakan sosial sebagai *pressure group* dapat dilihat dari perubahan kebijakan luar yang dihasilkan. Ketika *output* yang dihasilkan sesuai dengan *input* dalam teori sistem, maka gerakan sosial sebagai *pressure group* dapat dikatakan mempengaruhi jalannya sistem politik dan menjadi pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri di negara tersebut.

Untuk menunjukkan berjalannya sistem politik suatu negara dengan menggunakan teori sistem Gabriel Almond, keputusan yang dihasilkan melalui struktur dalam sistem pemerintahan seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan hasil dari sistem politik yang dipengaruhi oleh fungsi *input* yang menjalankan sosialisasi kepentingan, artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan. Berdasarkan skema yang terbentuk pada teori sistem Almond maka, pengaruh gerakan sosial Students for a Democratic Society dan Vietnam Veterans Against War terhadap perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam penghentian keterlibatan dan penarikan pasukan dari perang Vietnam dilakukan melalui tahapan sosialisasi, artikulasi dan agregasi kepentingan.

Pembentukan agenda anti-perang Vietnam yang dilakukan oleh gerakan sosial melalui tiga tahapan tersebut memunculkan beberapa pihak oposisi yang terbentuk dalam badan Kongres Amerika Serikat. Oposisi anti-perang tersebut kemudian melakukan diskusi jajak pendapat dan investigasi yang melibatkan anggota dari gerakan sosial dengan tujuan membuat amandemen yang digunakan untuk membatasi wewenang yang dimiliki oleh eksekutif. Hal itu menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan salah satu fungsi non-legislatif dalam Kongres Amerika Serikat sekaligus mendesak Presiden sebagai lembaga eksekutif untuk segera menarik pasukan dan menghentikan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat ditandai dengan penandatanganan Paris Peace Accords pada tanggal 27 Januari 1973 oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Vietnam yang menandakan penghentian segala macam aktivitas militer di kawasan Vietnam.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Alinsky, Saul D. *Rules for Radicals*. New York: Random House, 1971.
- Almond, Gabriel A. *The American People and Foreign Policy*. New York: Harcourt, Brace & Co, 1950.
- Appy, Christian G. *Patriots: The Vietnam War Remembered From All Sides*. London: Penguin, 2004.
- Brinkley, Douglas. *Tour of Duty: John Kerry and the Vietnam War*. New York: Harper Collins:2004.
- Chilcote, Ronald H. *Theories of Comparative Politics: The Search for a Freedom*. Edited by Haris Munandar and Dudy Priatna. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Cortright, David. *Soldiers in Revolt: GI Resistance During the Vietnam War*. Chicago: Haymarket Books, 2005.
- D'Amato, Anthony A. and Robert M. O'Neil. *The Judiciary and Vietnam*. New York: St. Martin's Press, 1972.
- della Porta, Donatella and Mario Diani. *Social movements: An introduction*. Oxford: Blackwell Publishing, 2006.
- Dellums, Ronald V. and H. Lee Halterman. *Lying Down with the Lions: A Public Life from the Streets of Oakland to the Halls of Power*. Boston: Beacon Press, 2000.
- Dobson, Alan P. and Steve Marsh. *US Foreign Policy Since 1945 Second Edition*. New York: Routledge, 2006.
- Freeman, Jo and Victoria Johnson. *Waves of Protest: Social Movements Since the Sixties*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 1999.

- Frum, David. *How We Got Here: The '70s*. New York, New York: Basic Books, 2000.
- Harmon, Mark D. *Found, Featured, then Forgotten: U.S. Network TV News and the Vietnam Veterans Against the War*. Newfound Press: University of Tennessee Libraries, 2011.
- Harris, Richard A. and Daniel J. Tichenor. *A History of the U.S. Political System: Ideas, Interest, and Institution*,. California: ABC-CLIO, 2010.
- Herring, Georgie C. *America's Longest War: The United States and Vietnam 1950 – 1975*. Second Edition. New York: Newbery Award Records, 1986.
- Leamer, Laurence. *The Paper Revolutionaries : The Rise of the Underground Press*. New York: Simon and Schuster, 1972.
- Mann, Robert. *A Grand Delusion: America's Descent Into Vietnam*. New York: Basic Books, 2001.
- Marquette, Scott. *America at War: Vietnam War*. Minnesota: Rourke Publishing, 2003.
- Moise, Edwin E. *Tonkin Gulf and the Escalation of the Vietnam War*. Chapel Hill: University of north Calorina Press, 1996.
- Morocco, John. *Rain of Fire: Air War, 1969–1973*. Boston: Boston Publishing Company, 1985.
- Nicosia, Gerald. *Home to War: A History of the Vietnam Veterans' Movement*. New York: Carroll & Graf Publishers, 2004.
- Norman, Philip. *John Lennon: The Life*. New York: HarperCollins Publishers Inc, 2008.
- Olson, James S. *Dictionary of The Vietnam War*. New York: Greenwood,1988.

Robbins, Marry S. *Against the Vietnam War: Writings by Activists*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2007.

Schmitz, David F. *The United States and Right-Wing Dictatorships, 1965-1989*. New York: Cambridge University Press, 2006.

Schroeder, Richard C. *Outline of U.S. Government*. Edited by Rosalie Targonski. U.S. Department of State: Office on International Information Programs, 2000.

Silalahi, Ulber. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Unpar Press, 2006.

Swain, Carol M. *Black Faces, Black Interests: The Representation of African Americans in Congress*. Maryland: University Press of America, 2006.

Wiest, Andrew. *The Vietnam War 1956-1975*. New York: Rosen Pub Group, 2008.

Young, Marilyn B. *The Vietnam Wars 1945-1990*. New York: HarperCollins Publishers, 1991.

## **TESIS**

Hodbod'ova, Zuzana. "The Vietnam War, Public Opinion and American Culture". Diploma Thesis., Masaryk University Brno Faculty of Education, 2008.

## **JURNAL ONLINE**

Barringer, Mark. "The Anti-War Movement in the United States". *Modern American Poetry* <http://www.english.illinois.edu/maps/vietnam/antiwar.html>. (diakses pada 26 September 2012).

- Belasco, Amy, Lynn J. Cunningham, Hannah Fischer, and Larry A. Niksch. "Congressional Restrictions on U.S. Military Operations in Vietnam, Cambodia, Laos, Somalia, and Kosovo: Funding and Non-Funding Approaches". *CRS Report for Congress*, (2007). <http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33803.pdf>. (diakses pada 6 Juni 2013).
- Bennett Woods, Randall. "Dixie's Dove: J. William Fulbright, The Vietnam War and the American South". *The Journal of Southern History*, Vol. 60, No. 3 (Aug., 1994), 551. <http://www.jstor.org/stable/2210992>. (diakses pada 6 Juni 2013).
- Bishop, Paul A. "American Anti War Activism and Peace Movement". <http://www.hc.cfl.edu/faculty-info/pbishop/amh-1020-article-two.aspx>. (diakses pada 8 Mei 2013).
- Blaisdell, Donald C. "Pressure Groups, Foreign Policy, and International Politics". *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 1958* 319: 149. <http://ann.sagepub.com/> (diakses pada 13 Juni 2013).
- D'Anieri, Paul, Claire Ernst and Elizabeth Kier. "New Social Movement in Historical Perspective". *Comparative Politics*, Vol. 22, No. 4 (Jul., 1990), pp. 445-458. <http://www.jstor.org/stable/421973> (diakses pada 14 Juni 2013).
- Dr. Zunes, Stephen and Jesse Laird. "The US Anti-Vietnam War Movement". *Summary of events related to the use or impact of civil resistance (1964-1973)*, (2010). <http://www.nonviolent-conflict.org/index.php/movements-and-campaigns/movements-and-campaigns-summaries?sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=21>. (diakses pada 15 Mei 2013).
- Eidenfalk, Joakim. "Towards a New Model of Foreign Policy Exchange". *Referred paper presented to the Australian Political Studies Association Conference University of Newcastle*, (2006), University of Wollongong, pp:1.

[http://www.newcastle.edu.au/Resources/Schools/Newcastle%20Business%20School/APSA/INTLREL/Eidenfalk-Joak\\_im.pdf](http://www.newcastle.edu.au/Resources/Schools/Newcastle%20Business%20School/APSA/INTLREL/Eidenfalk-Joak_im.pdf) (diakses pada 15 November 2012).

J. Parry, Shawn. "JOHN F. KERRY, VIETNAM VETERANS AGAINST THE WAR, SPEECH BEFORE THE U.S. SENATE COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS (22 April 1971)". *Voices of Democracy 2 (2007): 99-125*. <http://voicesofdemocracy.umd.edu/kerry-speech-before-the-senate-committee-textual-authentication/> (diakses pada 3 Mei 2013).

Jan, Tracy and Bryan Bender. "Roots of John Kerry's Secretary of State Ambition Lie in Wake of 2004 Defeat", *Political Intelligence*. [http://www.boston.com/politicalintelligence/2012/12/21/roots-john-kerry-secretary-state-ambition-lie-wake-defeat/qE3obS\\_65phxPdk6q1OdjGP/story.html](http://www.boston.com/politicalintelligence/2012/12/21/roots-john-kerry-secretary-state-ambition-lie-wake-defeat/qE3obS_65phxPdk6q1OdjGP/story.html). (diakses pada 4 Mei 2013).

Kinding, Jessie. "GI Movement: Underground Newspapers, GI Papers at Fort Lewis", Antiwar and Radical History Project. [http://depts.washington.edu/antiwar/gi\\_papers.shtml](http://depts.washington.edu/antiwar/gi_papers.shtml) (diakses pada 30 Mei 2013).

Leuchtenburg, William. "The Johnson Administration's Response to Anti-Vietnam War Activities". *Lexis Nexis Academic and Library Solution*. [http://www.lexisnexis.com/documents/academic/upa\\_cis/16501\\_LBJAdminAnti-VietnamActsPt1.pdf](http://www.lexisnexis.com/documents/academic/upa_cis/16501_LBJAdminAnti-VietnamActsPt1.pdf). (Diakses pada 26 September 2012).

Moise, Edwin E. "The Vietnam Wars : The Geneva Accords". (1998), [http://www.clemson.edu/caah/history/FacultyPages/Ed\\_Moise/viet\\_4.html](http://www.clemson.edu/caah/history/FacultyPages/Ed_Moise/viet_4.html). (diakses pada 7 Mei 2013).

## **WEBSITE**

- , "The House of Representatives Explained". <http://www.house.gov/content/learn/>. (diakses pada 4 Juni 2013)
- American Experience. "People & Events: Paris Peace Talks". <http://www.pbs.org/wgbh/american/honor/people/paris.html> (diakses pada 30 September 2012).
- American Workings Together, "The Paris Peace Accords," [http://home.earthlink.net/~proudvietnamveteran/americans\\_working\\_together/id13.html](http://home.earthlink.net/~proudvietnamveteran/americans_working_together/id13.html) (diakses pada 30 September 2012)
- Antiwar and Radical History Project. "Photos and Documents: GI Underground Newspapers". [http://depts.washington.edu/antiwar/photo\\_gipapers.php](http://depts.washington.edu/antiwar/photo_gipapers.php) (diakses pada 30 Mei 2013).
- Come Home America: George McGovern. "A Daily Republic Blog on the life and times of George McGovern". <http://mcgovern.areavoices.com/george-mcgovern/>. (diakses pada 6 Juni 2013).
- ConnecticutHistory.org. "Vietnam Veterans Against the War – Today in History; Social Movement". <http://connecticuthistory.org/vietnam-veterans-against-the-war-today-in-history/>. (diakses pada 2 Juni 2013).
- History Learning Site. "Protest Against Vietnam War". <http://www.historylearning-site.co.uk>. (diakses pada 26 september 2012).
- Michigan State University. "The Vietnam Moratorium. Students gather to protest the Vietnam War on October 15, 1969". <http://onthebanks.msu.edu/Object/1-4-29C/students-gather-to-protest-the-vietnam-war-october-15-1969/> (diakses pada 2 Juni 2013).
- Socialist Worker. "The Struggle That Stopped The Vietnam War: The Making of The Movement". (2005). 6-7. [http://socialistworker.org/2005-1/545/545\\_06\\_Movement.shtml](http://socialistworker.org/2005-1/545/545_06_Movement.shtml) (diakses pada 7 Mei 2013).

United States Senate Committee On Foreign Policy. "History of the Committee".

<http://www.foreign.senate.gov/about/history/>. (diakses pada 3 Juni 2013).

United States Senate. "1964-present Vietnam Hearings". [http://www.senate.gov/artandhistory/history/minute/Vietnam\\_Hearings.htm](http://www.senate.gov/artandhistory/history/minute/Vietnam_Hearings.htm).

(dikases pada 3 Juni 2013)

Vietnam Veterans Against War. "VVAW: Where We Came From, Who We Are".

<http://www.vvaw.org/about/> (diakses pada 26 September 2012).

Vietnam War. "Dellums Committee Hearings on War Crimes Vietnam". Vietnamese-

American.org. <http://www.vietnamese-american.org/dellums.pdf>. (diakses pada 7 Juni 2013).

Year in Review. "Vietnam Demonstrations". [http://www.upi.com/Audio/Year\\_in\\_Review/Events-of-1971/Vietnam-Demonstrations/12295509436546-5/](http://www.upi.com/Audio/Year_in_Review/Events-of-1971/Vietnam-Demonstrations/12295509436546-5/)

(diakses pada 13 Juni 2013).